



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 21 Desember 2024

Halaman: 1

tribunjogja.com

Tribun Jogja

HARIAN PAGI

SABTU PAHING
21 DESEMBER 2024
18 JUMADIL AKHIR 1446
NO 4864 TAHUN 14

Pemda DIY Distribusikan Dana Keistimewaan

Jaga Warisan Budaya dan Meningkatkan Ekonomi Lokal

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melaksanakan kegiatan tahunan berupa arahan dan penyerahan simbolis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Kalurahan.

Acara yang berlangsung di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, pada Jumat (20/12) itu dihadiri Gu-

bernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, serta perwakilan dari Kabupaten, Kota, dan Kalurahan penerima Dana Keistimewaan.

Dalam acara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan kembali lima tujuan utama Keistimewaan DIY yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,

yaitu: Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Kesejahteraan dan Ketentraman Masyarakat, Tata Pemerintahan yang Menjaga Keberagaman, Menciptakan Pemerintahan yang Baik, dan Mengembangkan Budaya Yogyakarta sebagai Warisan Bangsa.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah

untuk memberikan pengarahannya mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA 2025.

Selain itu, kegiatan ini juga diwarnai dengan penyerahan simbolis Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan Kalurahan

• ke halaman 7

SIMBOLIS - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan secara simbolis BKK kepada perwakilan dari Kabupaten, Kota, dan Kalurahan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan program-program Keistimewaan di DIY, Jumat (20/12) di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.

Jaga Warisan

● Sambungan Hal 1

sebagai dukungan untuk mempercepat pencapaian program strategis Gubernur DIY serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Pusat telah menetapkan pagu definitif Dana Keistimewaan DIY untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Penetapan ini tercapai setelah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyusunan Usulan Penyesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dana Keistimewaan di Jakarta pada 11-13 Desember 2024.

Dana Keistimewaan tersebut dialokasikan untuk beberapa urusan, antara lain: Urusan Kelembagaan sebesar Rp95,7 miliar, Urusan Kebudayaan Rp760 miliar, Urusan Pertanahan Rp58,8 miliar, dan Urusan Tata Ruang Rp285 miliar.

Alokasi dana ini kemudian didistribusikan ke wilayah DIY dengan rincian sebagai berikut. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperoleh Rp932,6 miliar, Kota Yogyakarta Rp45,9 miliar, Kabupaten Bantul Rp37,1 miliar, Kabupaten Kulon Progo Rp103 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp41,5 miliar, dan Kabupaten Sleman Rp39,6 miliar.

Selain untuk pembangunan di tingkat daerah, Dana Keistimewaan TA 2025 juga akan digunakan untuk mendukung berbagai program strategis di kabupaten, antara lain: BKK Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), BKK Balai Budaya, BKK Desa Mandiri Budaya, BKK Desa Wisata, BKK Desa Niaga, BKK Padat Karya, BKK Pengelolaan Sampah, dan BKK Reformasi Kalurahan.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa alokasi Dana Keistimewaan untuk masing-masing Kabupaten akan berbeda-beda, tergantung pada potensi dan kesiapan pelaksanaan kegiatan di setiap wilayah.

Penyerahan simbolis dana ini dilakukan Sekretaris Daerah DIY kepada Bupati, Wali Kota, serta perwakilan Kalurahan yang menerima manfaat tersebut.

Beny berharap, Dana Keistimewaan ini dapat memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat DIY.

"Kami memohon arahan dari Gubernur DIY agar pelaksanaan program dan kegiatan di TA 2025 bisa berjalan sesuai dengan visi pembangunan DIY yang berkeistimewaan," ujarnya.

Kebijakan strategis
Paniradya Pati Kaistimewaan, Aris Eko Nugroho, menjelaskan bahwa penentuan alokasi Dana Keistimewaan untuk tahun 2025 dilakukan berdasarkan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.

"Alokasi dana ini disesuaikan dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam aktivitas per itemnya," ujar Aris.

Aris berharap, penyerahan dana ini dapat menjadi momentum bagi kabupaten, kota, dan kalurahan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keistimewaan demi kesejahteraan masyarakat DIY.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menyatakan bahwa dana yang diterima akan dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, pengelolaan sampah, dan sektor-sektor lain yang mendukung keberlanjutan kota.

"Kami akan mengawal implementasi Dana Keistimewaan ini dengan baik, agar sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujar Sugeng.

Sementara itu, Pj Bupati Kulon Progo, Sri Nurkatsiwi, yang wilayahnya memperoleh alokasi terbesar dibandingkan daerah lainnya, mengungkapkan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada pengembangan kebudayaan, selain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanganan masalah sampah.

"Kebudayaan akan menjadi prioritas utama, namun pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanganan sampah juga menjadi bagian penting dari penggunaan dana ini," jelas Sri.

Arahan Sultan
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa Keistimewaan DIY bertujuan untuk memperkuat tata pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan peradaban melalui berbagai aspek, seperti kebudayaan, kualitas sosial, dan ekonomi.

Menurut Sri Sultan, pelaksanaan BKK ini merupakan bentuk nyata dari kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten, Kota, dan Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan keistimewaan.

Dalam pelaksanaannya, ada hak untuk berpartisipasi aktif dan kewajiban untuk menjaga dan melaksanakan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sri Sultan menekankan pentingnya pelaksanaan BKK yang bertanggung jawab, cepat direalisasikan, dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa BKK ini adalah bagian dari Grand Design Keistimewaan DIY, yang diterapkan melalui 12 peta jalan dan 11 strategi untuk mencapai target RPJMD DIY 2022-2027.

Sri Sultan berharap agar penerima BKK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, kebudayaan, dan ekonomi.

Acara ini ditutup dengan penyerahan simbolis BKK kepada perwakilan dari Kabupaten, Kota, dan Kalurahan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan program-program Keistimewaan di DIY. **(han/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005